

Analisis Penilaian Materialitas pada Laporan Keberlanjutan Industri Dasar dan Kimia

Rahayu Ningsih¹, Carmel Meiden²

^{1,2}Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
e-mail: ¹ ayu.ningsih2151@gmail.com, ² cmeiden2@gmail.com

Diterima	Direvisi	Disetujui
03-04-2022	25-08-2022	19-09-2022

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan informasi yang bersifat materialitas dalam pelaporan keberlanjutan di Indonesia, khususnya informasi materialitas pada laporan keberlanjutan industri dasar dan kimia di Indonesia. Pengungkapan informasi yang materialitas sangat membantu pemangku kepentingan pada proses pengambilan keputusan. Keterlibatan pemangku kepentingan yang sistematis, akan memperoleh pembelajaran untuk organisasi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga memperkuat kepercayaan antara organisasi dan para pemangku kepentingan. Hal tersebut akan memperkuat kredibilitas laporan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus pada 14 perusahaan industri dasar dan kimia dan wawancara dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Hasil penelitian menunjukkan pendefinisian materialitas pada laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh 14 perusahaan, terdapat 3 perusahaan yang tidak mengungkapkan definisi materialitas dalam laporan keberlanjutannya. Pemangku kepentingan yang berbeda terlibat pada proses penilaian materialitas. Dari berbagai tahap proses tidak semua perusahaan menyebutkan keterlibatan para pemangku kepentingannya pada penilaian materialitas. Perusahaan telah mempresentasikan berbagai masalah sebagai topik material dalam analisis materialitas. Sebagian besar perusahaan telah mengelompokkan isu-isu yang diidentifikasi di bawah tema yang berbeda seperti sosial, lingkungan, ekonomi. Terdapat 6 dari 14 perusahaan yang menyampaikan isu material yang utama dengan membagi pada tingkat materialitas yaitu “Tinggi”, “Sedang”, “Rendah”.

Kata Kunci: Materialitas, Laporan Keberlanjutan, Industri Dasar dan Kimia

Abstract – This research aims to describe materiality information in sustainability reporting in Indonesia, especially materiality information in basic and chemical industry sustainability reports in Indonesia. Disclosure of materiality information is very helpful for stakeholders in the decision-making process. Systematic stakeholder engagement will gain learnings for the organization and high accountability, thereby strengthening trust between the organization and stakeholders. This will strengthen the credibility of the report. The research method uses a qualitative approach with the design of case study research in 14 basic and chemical industry companies and interviews with PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. The results showed the definition of materiality in the sustainability report published by 14 companies, there were 3 companies that did not disclose the definition of materiality in their sustainability reports. Different stakeholders are involved in the materiality assessment process. Of the various stages of the process not all companies mention the involvement of their stakeholders on the assessment of materiality. The company has presented various issues as a material topic in the analysis of materiality. Most companies have grouped the issues identified under different themes such as social, environmental, economic. There are 6 out of 14 companies that convey the main material issues by dividing at the level of materiality, namely "High", "Medium", "Low".

Keywords : Materiality, Sustainability Report, Basic Industry and Chemistry

PENDAHULUAN

Perkembangan laporan keberlanjutan di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 2005 oleh NCSR. Praktik pelaporan keberlanjutan berawal bersifat *voluntary* (suka rela), kemudian menjadi praktik pelaporan keberlanjutan yang bersifat

mandatory (wajib). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga, Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik pada Bab IV Pasal 10 diatur mengenai LJK (Lembaga Jasa Keuangan), Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Laporan keberlanjutan yang dimaksud dapat

diungkapkan secara terpisah dari laporan tahunan maupun sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. Kinerja perusahaan pada tahun 2019 yang laporannya diterbitkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 54 perusahaan yang baru menerbitkan laporan keberlanjutan, tetapi pada tahun 2021 yang melaporkan laporan keberlanjutan 2020 tercatat kenaikan pelaporan keberlanjutan lebih dari 150% di mana sudah 135 perusahaan yang sudah memenuhi kewajiban pelaporan keberlanjutan perusahaannya (Liputan6.com).

Secara umum laporan keberlanjutan perusahaan berisi informasi tentang kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan perusahaan. Informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan perusahaan merupakan informasi yang mewakili kondisi perusahaan dari perspektif konsep keberlanjutan. Sebagian besar, manajemen perusahaan dalam menyiapkan laporan keberlanjutan perusahaan berpedoman pada Standar GRI, yang sekarang telah diperbarui menjadi Standar GRI 2016.

Dalam penyusunan laporan keberlanjutan diperlukan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas perusahaan atas tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan. Standar GRI memberikan prinsip yang dapat digunakan dalam menentukan isi laporan keberlanjutan. Prinsip tersebut meliputi: inklusivitas pemangku kepentingan; konteks keberlanjutan; materialitas; dan kelengkapan. Menurut (GRI, 2016), materialitas dalam laporan keuangan adalah ambang batas yang mempengaruhi ketetapan ekonomi pengguna laporan keuangan, seperti investor. Konsep ini juga sama dengan pentingnya pada laporan keberlanjutan, akan tetapi menyangkut dua dimensi yakni dampak yang luas serta pemangku kepentingannya. Pada laporan keberlanjutan, materialitas didefinisikan sebagai prinsip yang digunakan untuk menetapkan topik yang sesuai dengan memperhatikan mana yang cukup penting sehingga wajib dilaporkan. Dalam mengidentifikasi topik material perusahaan harus mencakup penjelasan tentang bagaimana prinsip materialitas diterapkan (GSSB, 2016). Topik material merupakan topik yang memberikan tingkat signifikansi yang tinggi sehingga memberikan pengaruh maupun dampak pada penilaian, tindakan, keputusan dan kinerja dari perusahaan atau organisasi serta para pemangku kepentingan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada pelaporan keberlanjutan, konsep materialitas dikenal sebagai ambang pelaporan, di mana berbagai pemangku kepentingan dan topik yang lebih luas diakui (Beske et al., 2019). Kurniawan (2018) berpendapat bahwa konsep informasi materialitas sangat penting untuk diketahui sehingga dapat menyajikan informasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Informasi material akan sangat membantu para pemangku kepentingan dalam konteks pengambilan keputusan. Keterlibatan pemangku kepentingan yang sistematis, akan memperoleh pembelajaran dalam

organisasi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga memperkuat kepercayaan antara organisasi dan para pemangku kepentingan. Hal tersebut akan memperkuat kredibilitas laporan.

Dalam penilaian materialitas di GRI, (GRI G4, 2013) memberikan panduan detail untuk mengidentifikasi aspek dan topik material. Pedoman GRI G4 menjabarkan empat urutan langkah untuk merencanakan dan menerapkan materialitas. Panduan menentukan aspek material dan batasannya meliputi: (1) identifikasi; (2) prioritas; (3) validasi; (4) tinjauan.

Fenomena dalam industri dasar dan kimia pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau PT SBI terjadi pada bulan Februari 2020 yang dilakukan seorang ahli politik muda Nasdem Ahmad Sahroni yang mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan uji AMDAL yang merupakan keluhan yang diungkapkan pihak sekolah Nizamia Andalusia terhadap kegiatan proyek pembuatan beton readymix milik PT SBI. Aktivitas yang dilakukan PT SBI berdampak pada turunnya kualitas udara, penurunan kualitas air tanah, persoalan limbah padat, peningkatan kebisingan, dan limbah B3 yang memberikan dampak kualitas masyarakat sekitar, serta mengganggu kegiatan belajar mengajar yang ada di sekitar (mediaIndonesia.com). Dalam kaitannya dengan materialitas, lingkungan pekerjaan juga merupakan aspek penting yang wajib diperhatikan perusahaan dalam pendirian industri. Oleh sebab itu, masalah utama materialitas perlu dijelaskan dalam laporan keberlanjutan. Namun, dengan banyaknya atau terjadinya keberbagaian penggunaan standar dalam penentuan materialitas setiap perusahaan mengakibatkan terjadinya hasil materialitas yang berbeda.

Penelitian materialitas pada laporan keberlanjutan telah banyak dilakukan di internasional. Beberapa penelitian terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Aryal, 2017) pada industri penerbangan dengan fokus penelitian untuk menggambarkan praktik penilaian materialitas saat ini dalam pelaporan keberlanjutan di industri penerbangan. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat hasil yang belum sesuai dengan standar GRI G4 pelaporan keberlanjutan. Hasil menunjukkan bahwa laporan penerbangan tidak memiliki transparansi dalam analisis materialitas yang dikarenakan sangat sedikit informasi yang diberikan mengenai proses materialitas. Serta laporan juga gagal untuk mendefinisikan materialitas dan menyampaikan kepada pembaca mengapa perusahaan melakukan analisis materialitas. Meskipun, laporan didasarkan pada pedoman yang sama dan memiliki operasi bisnis yang sama, ada perbedaan mencolok pada proses, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam analisis materialitas. GRI mendefinisikan materialitas sebagai kriteria ambang batas yang menjadikan aspek cukup penting sehingga perlu dilaporkan. Maka, proses penilaian materialitas perlu dijelaskan secara rinci karena tidak

hanya penting untuk bagian penilaian materialitas namun untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi seluruh laporan.

Penelitian yang dilakukan (Kurniawan, 2017) pada industri perbankan di Indonesia yang berfokus pada materialitas informasi pada laporan keberlanjutan. Mengenai pemodelan peta materialitas pada industri perbankan. Hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sampai 2016 informasi yang diungkapkan bersifat material. Hasil tersebut secara umum sama dengan hasil penelitian GRI.

Kemudian penelitian yang dilakukan (Beske et al, 2019) pada 33 perusahaan di Jerman yang terdaftar dalam HDAX 110 pada tahun 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian perusahaan menetapkan metode yang digunakan untuk topik dan aspek material. Namun hanya beberapa perusahaan yang menunjukkan dan seberapa relevan pemangku kepentingan. Dari metode yang digunakan untuk mendefinisikan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa perusahaan cenderung meningkatkan informasi mengenai cara perusahaan untuk mengidentifikasi kepentingan utama perusahaan. Dan dengan penerapan GRI G4 perusahaan melaporkan secara rinci mengenai proses materialitas dan indeks pengungkapan menunjukkan *ceteris paribus* peningkatan tingkat pelaporan.

Penelitian yang dilakukan (Slacik & Greiling, 2019) pada 186 perusahaan utilitas listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materialitas masih belum cukup dilembagakan seperti yang direkomendasikan oleh pedoman GRI-G4 dan literatur sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, dan keberagaman hasil penelitian sebelumnya serta kurangnya penelitian materialitas di Indonesia khususnya pada industri dasar dan kimia, peneliti bertujuan dalam melakukan penelitian ini yakni :

1. Untuk menemukan keseluruhan proses penilaian materialitas yang diuraikan dalam laporan keberlanjutan industri dasar dan kimia.
2. Untuk menemukan peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penilaian materialitas industri dasar dan kimia.
3. Untuk menemukan masalah keberlanjutan utama yang diidentifikasi oleh industri dasar dan kimia.

Dengan menggunakan laporan keberlanjutan perusahaan tahun 2020 dan berpedoman pada standar GRI yang terbaru yaitu *GRI Standard 2016*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu masalah yang harus diperiksa pada suatu

kondisi yang nyata dari berbagai sudut dengan menggunakan metode pengumpulan data secara gabungan, sifat analisis datanya induktif maupun kualitatif, serta penggunaan penelitian kualitatif menciptakan arti dari pada penyamarataan.

Objek penelitian menggunakan industri dasar dan kimia yang mencakup 14 perusahaan. Masing-masing sub sektor menerbitkan laporan keberlanjutan (*Sustainability report*) secara terpisah maupun yang terdapat dalam laporan tahunan (*Annual report*).

Tabel 1. Objek Penelitian

No	Sub Sektor	Jumlah Emiten
1	Semen	6
2	Kimia	2
3	Plastik & Kemasan	3
4	Pakan Ternak	2
5	Lainnya	1

Sumber: Data diolah kembali (2022)

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data primer serta data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara pada salah satu objek penelitian yaitu PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Pada bagian SD *expert* dan *Corporate Communications Superintendent Region 1* sebanyak 2 orang. Alasan memilih perusahaan tersebut karena dari 14 objek penelitian yang bersedia untuk melakukan wawancara hanya perusahaan tersebut.

Kemudian pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi. Peneliti menggunakan data-data yang terdapat pada laporan keberlanjutan maupun laporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan laporan tahunan. Laporan tersebut diperoleh dari masing-masing 14 perusahaan industri dasar dan kimia. Laporan keberlanjutan yang digunakan yaitu laporan yang diterbitkan pada tahun 2020 yang diperoleh dari situs *website* resmi masing-masing perusahaan. Serta dalam penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

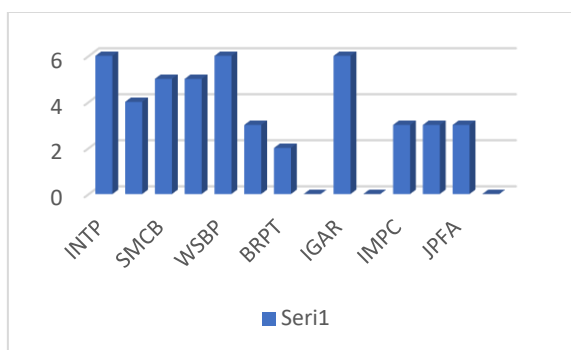
Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel yakni: (a) perusahaan industri dasar dan kimia yang merupakan perusahaan *go public*; (b) perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2020; (c) perusahaan menyediakan menu laporan keberlanjutan pada situs *website* perusahaan.

Terdapat tiga aktivitas teknik analisis data di lapangan model Miles and Huberman yang digunakan dalam penelitian ini, tiga aktivitas tersebut dikemukakan oleh (Sugiyono, 2013:246) : (1) *Data Reduction* (Reduksi Data) : pernyataan isu materialitas merupakan tahap pertama yang dilakukan peneliti dengan mencatat isu-isu material yang diidentifikasi dalam laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan; (2) *Data Display* (Penyajian Data) : setelah melakukan reduksi data,

langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti yaitu menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk grafik kemudian disajikan secara deskriptif; (3) *Conclusion Drawing* (Menarik Kesimpulan) : dalam tahap ini peneliti akan menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan adanya penyajian data yang dikemukakan pada tahap sebelumnya yang didukung data-data yang jelas, maka dapat diambil kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Materialitas dalam Laporan Keberlanjutan



Sumber: Data diolah kembali (2022)

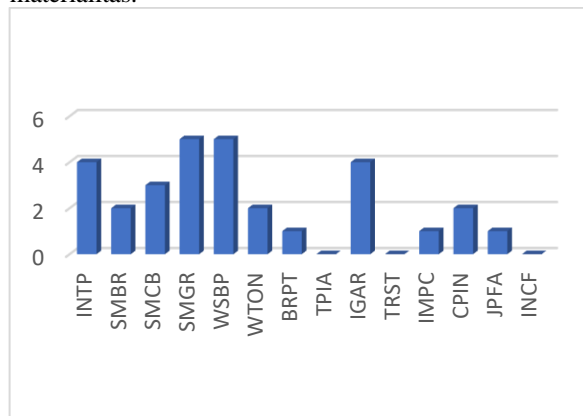
Gambar 1. Jumlah Kata Kunci pada Definisi Isu Materialitas

Berdasarkan Gambar 1 dalam pendefinisian materialitas pada laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh 14 perusahaan, terdapat 3 perusahaan yang tidak mengungkapkan definisi materialitas dalam laporan keberlanjutannya. Perusahaan tersebut yaitu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), PT Trias Sentosa Tbk (TRST), dan PT Indo Komoditi Korpora Tbk (INCF). Rata-rata perusahaan menggunakan 3 kata kunci yang digunakan sebagai definisi materialitas. Perusahaan yang menggunakan kata kunci yang paling banyak yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), dan PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) yaitu sebanyak 6 kata kunci. Kata kunci tersebut yaitu SC2030 HeidelbergCement Group; karakteristik; pemangku kepentingan; direksi; laporan tahun sebelumnya; masukan; program; langsung; operasi perseroan; signifikan; ekonomi, lingkungan, sosial; penilaian; keputusan; identifikasi; prioritas; dampak; pengaruh; perseroan; anak perusahaan; FGD; survei; bisnis/praktik bisnis; biro; konsultan; keberlanjutan perusahaan; pelanggan; masyarakat; tinggi, sedang, rendah; pilar keberlanjutan; dan TPB. Terdapat 30 kata kunci yang digunakan oleh 11 perusahaan yang mendefinisikan materialitas. Kata kunci yang paling banyak digunakan yaitu pemangku kepentingan sebanyak 10 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar

perusahaan dalam menentukan topik material dan menerapkan strategi keberlanjutannya dengan melibatkan para pemangku kepentingannya sesuai dengan persyaratan dalam GRI *Standard*.

Peran Pemangku Kepentingan yang Dilibatkan

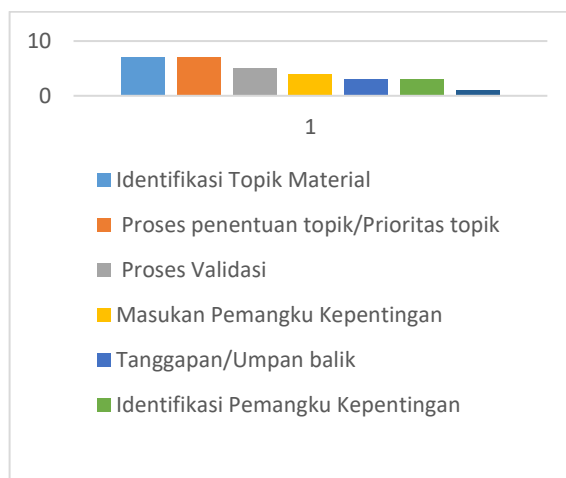
Pemangku kepentingan yang berbeda terlibat dalam proses penilaian materialitas. Dari berbagai tahap proses pada laporan yang dianalisis, tidak semua perusahaan menyebutkan tentang keterlibatan para pemangku kepentingannya dalam penilaian materialitas.



Sumber: Data diolah kembali (2022)

Gambar 2. Jumlah Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Penilaian Materialitas

Berdasarkan Gambar 2 terdapat tiga perusahaan yang tidak mengungkapkan keterlibatan pemangku kepentingannya, yaitu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), PT Trias Sentosa Tbk (TRST), dan PT Indo Komoditi Korpora Tbk (INCF). Tahap pelibatan pemangku kepentingan yang diterapkan yaitu identifikasi topik material; proses penentuan topik/prioritas topik; proses validasi; masukan pemangku kepentingan; tanggapan/umpan balik; identifikasi pemangku kepentingan; dan evaluasi.

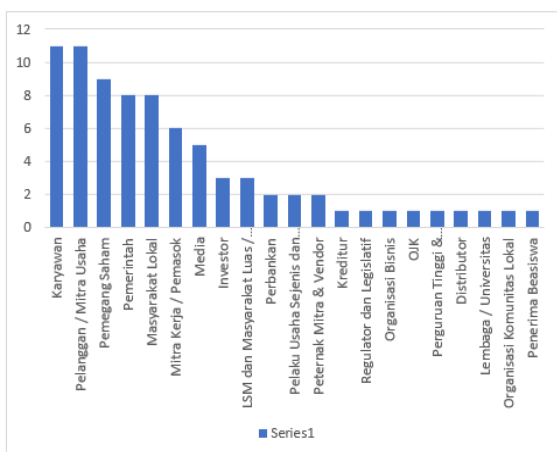


Sumber: Data diolah kembali (2022)

Gambar 3. Frekuensi Tahap Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Penilaian Materialitas

Berdasarkan Gambar 3 diperoleh hasil tahap pelibatan pemangku kepentingan yang paling banyak diterapkan yaitu identifikasi topik material dan proses penentuan topik/prioritas topik. Perusahaan yang menerapkan tahap identifikasi topik material yaitu PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (INTP), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMCB), PT Solusi Bangun Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR), dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN). Sedangkan perusahaan yang menerapkan tahap proses penentuan topik/prioritas topik yaitu PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (INTP), PT Solusi Bangun Indonesia (Persero) Tbk (SMCB), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR), dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA).

12 dari 14 perusahaan menyediakan daftar pemangku kepentingan dalam pelaporan keberlanjutannya. Perusahaan yang tidak menyediakan daftar kelompok pemangku kepentingan yaitu PT Trias Sentosa Tbk (TRST) dan PT Indo Komoditi Korpora Tbk (INCF). Perusahaan yang mengidentifikasi pemangku kepentingan terbanyak yaitu PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) sebanyak 11 kelompok pemangku kepentingan. Kemudian perusahaan yang mengidentifikasi pemangku kepentingan paling sedikit yaitu PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), dengan masing-masing sebanyak 5 kelompok pemangku kepentingan. Pada daftar pemangku kepentingan yang disediakan oleh masing-masing perusahaan selain mengidentifikasi pemangku kepentingan juga mengidentifikasi metode pelibatan, frekuensi, dan topik / masalah yang penting untuk pemangku kepentingan.



Sumber: Data diolah kembali (2022)

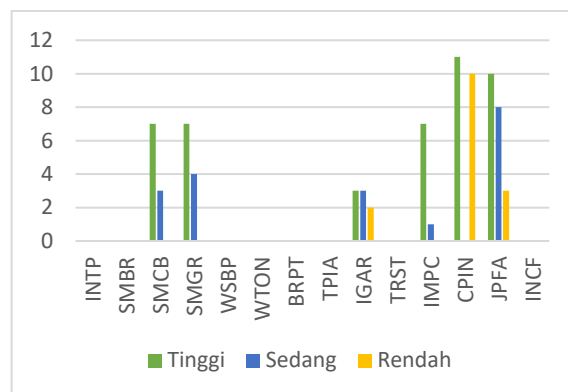
Gambar 4. Frekuensi Kelompok Pemangku Kepentingan

Dari daftar pemangku kepentingan yang diidentifikasi oleh masing-masing perusahaan. Berdasarkan Gambar 4 dari proses reduksi data diperoleh bahwa kelompok pemangku kepentingan

yang paling banyak diidentifikasi yaitu Karyawan, dan Pelanggan / Mitra usaha. Yakni masing-masing sebanyak 11 dari 12 perusahaan. Sedikit perusahaan industri dasar dan kimia yang terlibat dengan kelompok pemangku kepentingan seperti Kreditur; Regulator dan Legislatif; Organisasi Bisnis; OJK; Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat Sipil; Distributor; Lembaga / Universitas; Organisasi Komunitas Lokal; dan Penerima Beasiswa hanya diidentifikasi oleh 1 dari 12 perusahaan.

Materialitas Tingkat Tinggi yang Didefinisikan Oleh Industri Dasar dan Kimia

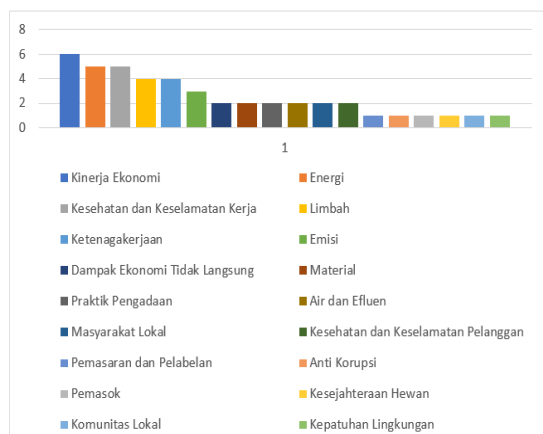
Perusahaan telah mempresentasikan berbagai masalah sebagai topik material dalam analisis materialitas mereka. Sebagian besar perusahaan telah mengelompokkan isu-isu yang diidentifikasi di bawah tema yang berbeda seperti sosial, lingkungan, dan ekonomi. Isu tata kelola sebagai masalah material utama oleh PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (INTP) dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA). Untuk penilaian materialitas, perusahaan dapat menentukan topik material berdasarkan tingkat materialitas. Adapun tingkat materialitas tersebut dibagi menjadi 3 yaitu “Tinggi”, “Sedang”, “Rendah”.



Sumber: Data diolah kembali (2022)

Gambar 5. Topik Material Berdasarkan Tingkat Materialitas

Berdasarkan Gambar 5 diperoleh terdapat 6 dari 14 perusahaan yang menyampaikan isu material yang utama dengan membagi pada 3 tingkat materialitas. Adapun bentuk penyajiannya dengan menggunakan matriks materialitas maupun tabel materialitas. Perusahaan yang menyampaikan isu material tersebut yaitu PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR), PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). Terdapat 8 dari 14 perusahaan mengungkapkan topik material namun tidak mengungkapkan pengelompokan tingkat materialitas atas topik materialnya, baik “Tinggi”, “Sedang”, maupun “Rendah”.



Sumber: Data diolah kembali (2022)

Gambar 6. Jumlah Topik Materialitas Tingkat Tinggi

Berdasarkan Gambar 6, diperoleh topik yang paling banyak diungkapkan yaitu Kinerja Ekonomi. Yang menunjukkan bahwa 6 perusahaan tersebut mengungkapkan topik tersebut. Kemudian topik material yang paling sedikit diungkapkan yaitu Pemasaran dan Pelabelan; Anti Korupsi; Pemasok; Kesejahteraan Hewan; Komunitas Lokal; dan Kepatuhan Lingkungan. Adapun perusahaan yang mengungkapkan topik tersebut yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR). Dalam pendefinisian topik material perusahaan telah mengkategorikan pada 3 aspek yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Sesuai dengan Standar GRI.

Definisi Materialitas dalam Laporan Keberlanjutan

Standar GRI 2016 merupakan standar pelaporan yang banyak digunakan dalam pelaporan keberlanjutan untuk industri dasar dan kimia serta di sektor lain. Dari hasil analisis tidak semua perusahaan dalam menentukan isu materialitas menerapkan keempat prinsip yang ditetapkan dalam Standar GRI 2016.

Berdasarkan hasil penelitian, pendefinisian materialitas sebagian besar sudah diungkapkan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memahami definisi materialitas dan pentingnya materialitas untuk perusahaan dan pemangku kepentingan. Terdapat kata kunci utama yang digunakan sebagai penentuan prioritas masalah materialitas yaitu pemangku kepentingan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pada definisi materialitas, perusahaan menerapkan kriteria prinsip materialitas pada (AA1000AP, 2018). Yaitu pada kriteria ke-10: buat dan ungkapkan pemahaman dan prioritas yang komprehensif dan seimbang dari topik keberlanjutan material untuk organisasi dan pemangku kepentingannya. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa pendefinisian materialitas sudah cukup baik namun dapat ditingkatkan. Untuk 3 perusahaan yang tidak mendefinisikan materialitas

untuk pelaporan tahun berikutnya dapat mengungkapkan pendefinisian materialitasnya, sebagai peningkatan akuntabilitas dan transparansi seluruh laporan serta proses penilaian materialitas dapat digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutannya untuk masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dalam mendefinisikan materialitasnya dengan memperhatikan dampaknya pada pemangku kepentingan dan berdampak signifikan bagi perusahaan secara sosial, lingkungan, serta ekonomi. Sesuai dengan yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

Peran Pemangku Kepentingan yang Dilibatkan

Dari hasil analisis ditemukan bahwa sebagian besar perusahaan mengungkapkan pemangku kepentingan yang diidentifikasi. Dari susunan kelompok pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruhnya dapat diketahui pemangku kepentingan yang memberikan pengaruh paling besar dalam industri dasar dan kimia yaitu Karyawan dan Pelanggan/Mitra Usaha. Kedua pemangku kepentingan itu diidentifikasi oleh 11 perusahaan. Terdapat 2 perusahaan yang tidak menyediakan daftar kelompok pemangku kepentingan yaitu PT Trias Sentosa Tbk (TRST) dan PT Indo Komoditi Korpora Tbk (INCF).

Sesuai dengan teori pemangku kepentingan yang diungkapkan oleh Freeman dan David (1983), bahwa pemangku kepentingan dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu *the wide sense of stakeholder* (arti luas) dan *the narrow sense of stakeholder* (arti sempit). Dari hasil analisis yang diperoleh, kelompok pemangku kepentingan dalam arti luas yang diidentifikasi industri dasar dan kimia adalah masyarakat lokal; media; LSM & masyarakat luas; pelanggan/mitra usaha; investor; pelaku usaha sejenis & asosiasi; peternak mitra & vendor; regulator & legislatif; organisasi bisnis; perguruan tinggi & organisasi masyarakat sipil; OJK; organisasi komunitas lokal; dan penerima beasiswa. Sedangkan kelompok pemangku kepentingan dalam arti sempit yang diidentifikasi industri dasar dan kimia adalah karyawan; pemegang saham; pemerintah; mitra kerja/pemasok; perbankan; kreditur; distributor; lembaga/universitas. Hal tersebut sesuai dengan AccountAbility (2015), menyebutkan bahwa pemangku kepentingan bukan hanya anggota masyarakat atau organisasi non-pemerintah. Tetapi termasuk kelompok individu maupun individu atau organisasi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan organisasi, produk atau layanan yang terkait dengan isu-isu yang harus ditangani keterlibatannya.

Menurut GRI G4 (2013), dalam penilaian materialitas, pemangku kepentingan dapat dilibatkan dalam penilaian materialitas melalui tahap identifikasi, prioritas, validasi, dan tinjauan. Dari hasil analisis yang diperoleh sebagian besar perusahaan telah menerapkan tahapan tersebut. Namun diperoleh ketidakseragaman perusahaan

dalam menerapkan tahapan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk untuk mendapatkan aspirasi dari pemangku kepentingan dengan melakukan serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD). Bentuk FGD tidak selalu dilakukan dengan mengundang pemangku kepentingan dalam forum, *meeting*, ataupun *workshop* yang besar karena hal tersebut tidak efektif, sehingga dilakukan dengan melakukan kunjungan-kunjungan. Para pemangku kepentingan yang dilibatkan perusahaan sesuai dengan daftar kelompok pemangku kepentingan yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan.

Materialitas Tingkat Tinggi yang Didefinisikan Oleh Industri Dasar dan Kimia

Perbedaan jumlah masalah material yang diidentifikasi menunjukkan bahwa pendekatan industri dasar dan kimia terhadap materialitas tidak seragam. Perusahaan yang mengidentifikasi masalah material paling banyak yaitu PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), sebanyak 14 masalah material. Masalah material yang diidentifikasi masing-masing perusahaan diungkapkan berdasarkan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan masalah lainnya diluar aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Sesuai dengan teori legitimasi menurut (Ghozali & Chariri, 2014) bahwa untuk memperoleh keyakinan masyarakat atas dampak aktivitas yang telah dilakukan perusahaan, perusahaan harus mengungkapkan informasi ekonomi, lingkungan, dan sosial pada laporan keberlanjutannya. Serta legitimasi sangat diperlukan untuk organisasi (Dowling & Pfeffer, 1975).

Beberapa perusahaan industri dasar dan kimia telah mengidentifikasi masalah material dengan matriks materialitas dan tabel materialitas untuk menentukan tingkat materialitas yang "Tinggi", "Sedang", dan "Rendah". Matriks materialitas digunakan untuk menyajikan isu-isu yang penting bagi bisnis dalam satu poros dan isu-isu yang penting bagi para pemangku kepentingan (Aryal, 2017). Terdapat 6 dari 14 perusahaan yang telah mengidentifikasi masalah material dengan matriks materialitas maupun tabel materialitas. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian materialitas AA1000AP pada kriteria penentuan materialitas. Dari hasil analisis diperoleh susunan masalah material tingkat tinggi berdasarkan pada dampak bagi pemangku kepentingan serta dampak bagi sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Dari hasil wawancara diperoleh dalam menentukan isi laporan dan topik material utama didasarkan pada pilar-pilar keberlanjutan perusahaan yaitu solusi bagi masa depan yang berkelanjutan, menjaga karyawan kami untuk tetap produktif, tanggung jawab sosial-pelibatan dan pengembangan masyarakat, inisiatif kami dalam pelestarian lingkungan dan alam, serta tata kelola dan integrasi. Namun batasan masalah yang diungkapkan dalam pelaporannya kurang spesifik. Oleh karena itu PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dapat mengungkapkan

batasan topik dalam pelaporan keberlanjutan dengan jelas.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sebagian perusahaan telah mengungkapkan definisi materialitas dengan jumlah kata kunci yang beragam, tidak semua perusahaan melibatkan pemangku kepentingan dalam analisis materialitas pada 4 tahap sesuai dengan standar GRI G4, serta industri dasar dan kimia telah mengidentifikasi masalah material utama tingkat tinggi dengan mempertimbangkan dampak yang luas pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian berdasarkan aspek objek yaitu hanya melakukan penelitian pada industri dasar dan kimia yang berfokus pada aspek materialitas, berdasarkan aspek penelitian yaitu peneliti menggunakan laporan keberlanjutan tahun 2020, dan berdasarkan unit analisis yaitu penelitian ini menggunakan pedoman pelaporan pada Standar GRI 2016.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Perusahaan
Bagi perusahaan dalam pengungkapan topik materialitas tingkat tinggi kurangnya pendefinisian dalam menentukan topik material. Dan ketidakseragaman pengungkapan keterlibatan pemangku kepentingan. Maka diharapkan perusahaan yang sudah melaporkan sesuai dengan Standar GRI 2016 maupun standar pelaporan yang digunakan harus dipertahankan dan meningkatkan kualitasnya, bagi yang belum melaporkan sesuai dengan standar perlu ditingkatkan dalam pendefinisian isu materialitas, keterlibatan peran pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam setiap tahap materialitas, dan materiilias tingkat tinggi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Khususnya topik material dalam aspek kepatuhan lingkungan perlu ditingkatkan dan menjadikan topik material tingkat tinggi, karena industri dasar dan kimia menghasilkan limbah yang berbahaya yang berasal dari proses produksi apabila tidak diselesaikan dengan baik berkemungkinan dapat merusak lingkungan seperti polusi air akibat zat-zat kimia, dan polusi udara serta kebisingan yang mengganggu pendengaran.
2. Investor
Bagi investor dapat menggunakan informasi dalam laporan keberlanjutan, tidak hanya menyangkut informasi material dalam kinerja ekonomi perusahaan, tetapi juga dapat mempertimbangkan informasi material dalam kinerja sosial perusahaan, dan kinerja lingkungan perusahaan. Khususnya yang sudah patuh baik bagi pengambilan keputusan sebagai salah satu informasi penting diluar laporan keuangan.
3. Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya dapat mencari isu permasalahan lain dalam laporan keberlanjutan yang

perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, menggunakan tahun penerbitan laporan keberlanjutan yang terbaru, dan menggunakan standar pelaporan yang berbeda selain Standar GRI 2016 seperti SASB, dan IIRC. Apabila emiten tidak menyediakan gambar matriks materialitas, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengelompokkan topik material pada tahap “Tinggi”, “Sedang”, dan “Rendah”. Serta pendefinisian materialitas tidak hanya berfokus pada kata kunci saja melainkan pada topik materialnya juga.

REFERENSI

- AA1000AP. (2018). *Prinsip-prinsip 2018 accountability*.
AccountAbility. (2015). *AA1000 Stakeholder Engagement Standards*. 1–40.
Aryal, N. (2017). *Materiality assessment in sustainability reporting: case study of the airline industry*. 1–64.
Beske, F., Haustein, E., & Lorson, P. C. (2019). Materiality analysis in sustainability and integrated reports. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(1), 162–186.
Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, Vol.18.
Freeman, R. E., & David, L. R. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25(3), 88–106.
Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). Teori Akuntansi. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
GRI. (2016). GRI 101: Fundamental 2016. In *GSSB* (Vol. 1, Issue 1).
GRI G4. (2013). Pedoman Pelaporan Keberlanjutan G4. *Global Reporting Initiative*. www.globalreporting.org
GSSB. (2016). *GRI 102: Pengungkapan Umum 2016*.
Kurniawan, P. S. (2017). PEMODELAN PETA MATERIALITAS INFORMASI PADA LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN (Suatu Tinjauan Mengenai Pelaporan Keberlanjutan Industri Perbankan di Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 2(2), 202–223.
Kurniawan, P. S. (2018). *An Analysis of Information Materiality on Corporate Sustainability Report Using Information Materiality Map: A Review in Mining Industry in Indonesia*.
Liputan 6 (2021), "Perusahaan Wajib Sampaikan Laporan Berkelanjutan", diakses 16 Februari 2022, <https://www.liputan6.com/saham/read/461719/perusahaan-wajib-sampaikan-laporan-berkelanjutan>.
Media Indonesia (2020), "Pemprov DKI Harus Uji Amdal PT SBI", diakses 5 Januari 2022, <https://mediaindonesia.com/megapolitan/292808/pemprov-dki-harus-uji-amdal-pt-sbi>.
POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.
Slacik, J., & Greiling, D. (2019). Compliance with materiality in G4-sustainability reports by electric utilities. *International Journal of Energy Sector Management*, 14(3), 583–608.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. In *Alfabeta*. Alfabeta.